

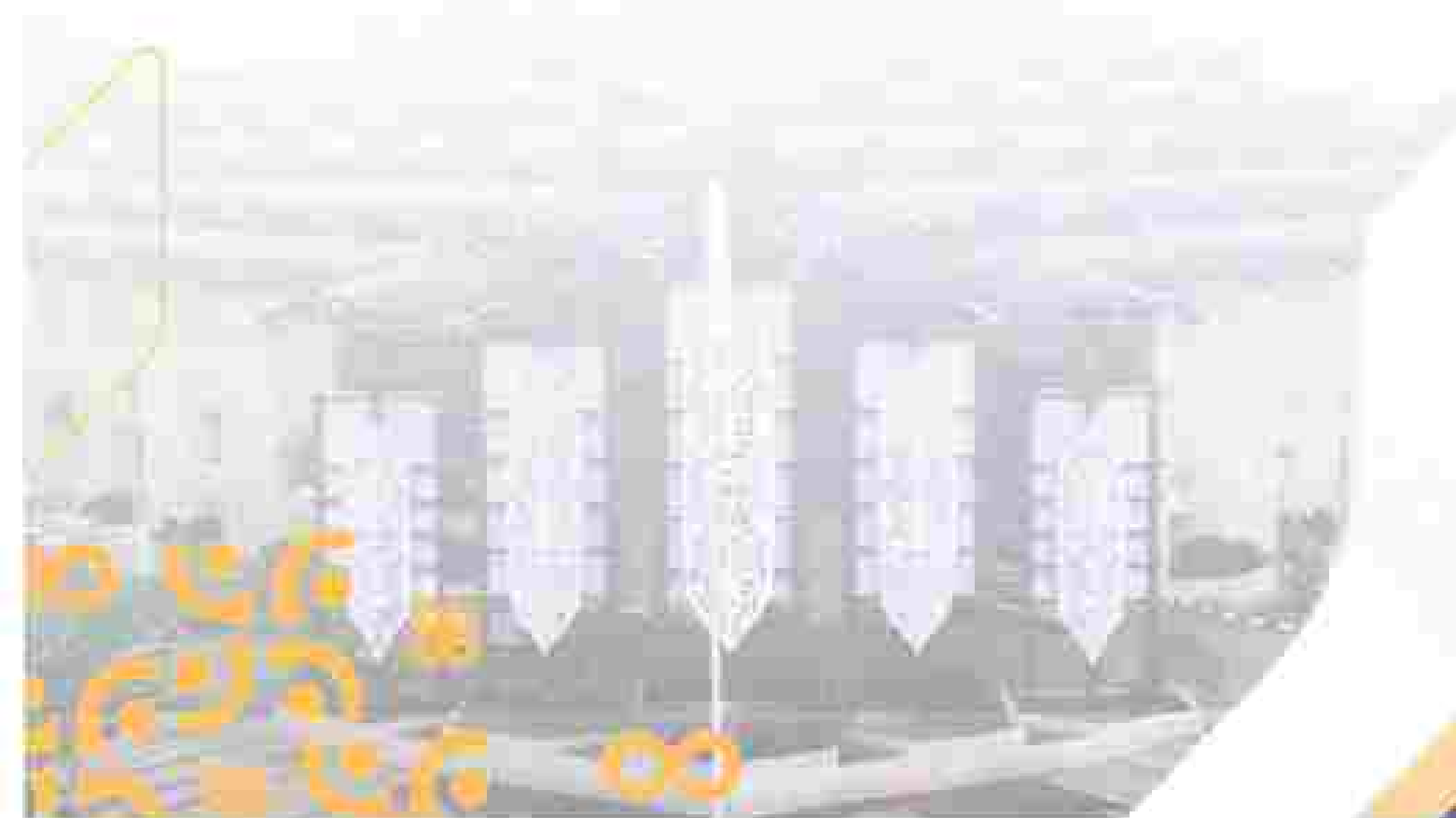


SEKRETARIAT DIPRO
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



MEMBANGUN
KALTIM
UNTUK
NUSANTARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (C A L K)



BAB I

PENDAHULUAN

Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang tentang pembentukan Dan Susunan Organisasi Tugas fungsi dan Tatakerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli, kelompok pakar/tim ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Permendagri nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik dan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenclatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Kepala SKPD harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari *Laporan Realisasi Anggaran (LRA)*, *Neraca*, *Laporan Operasional (LO)*, *Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)* dan *Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)*.

1.1. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Dinas Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 antara lain merupakan sarana pertanggungjawaban pengelolaan keuangan selama TA 2024 serta untuk memenuhi syarat peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah terajunya informasi keuangan yang relevan dan memadai bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Dalam hal memenuhi tujuan tersebut maka informasi yang harus disajikan minimum meliputi:

- Informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran dan telah sesuai dengan alokasi anggaran sebagaimana telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (Laporan Realisasi Anggaran).
- Informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan beserta hasil-hasilnya (Laporan Operasional).

- Informasi tentang perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang telah dilakukan (Laporan Perubahan Ekuitas).
- Informasi tentang besarnya kekayaan dan kewajiban yang timbul pada saat kegiatan berakhir (Neraca).

1.2. Landasan Hukum

Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 23 = Amendemen Ketiga Undang-Undang Dasar-Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Pemecasaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pembahasan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Jabatan Pelaksana Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
12. Surat Edaran Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 900/7094/997-IV/Keu tentang Revisi Pengelolaan Persediaan;
13. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900/185/024-IV/Keu tentang Pengelolaan Keuangan;
14. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900.1/18742/BPKAD tentang pelaksanaan administrasi keuangan berkenaan dengan akhir tahun Tahun

Anggaran 2024 dan awal Tahun Anggaran 2025 serta penyampaian laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah Tahun 2024.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Keuangan Dinas SEKRETARIAT DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan format penyajian Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan penyajian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

- 3.1. Situasi realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi/ entitas pelaporan keuangan daerah SKPD
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah pada SKPD

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

- 5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD
 - 5.1.1. Pendapatan
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Transfer (kecuali SKPKD)
 - 5.1.4. Pembiayaan (kecuali SKPKD)
 - 5.1.5. Pendapatan LO
 - 5.1.6. Beban LO
 - 5.1.7. Aset
 - 5.1.8. Kewajiban
 - 5.1.9. Ekuitas
- 5.2. Pengungkapan Atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul berhubungan dengan penerapan basis akrual Atas pendapatan dan belanja dan

rekonsiliasinya dengan penutupan basis kas, untuk entitas akuntansi / entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD

Bab VI Penjelasan Atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTIAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Berdasarkan Laporan Petekonomian Provinsi Kalimantan Timur yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 2 September 2019 di berandanya¹, dapat diprediksi secara kumulatif ekonomi Kalimantan Timur tumbuh pada rentang 2.42 – 3.22% (yoy) dengan tingkat inflasi pada rentang target inflasi nasional sebesar 3,50±1% (yoy). Kondusifnya ekonomi makro ini sangat menunjang misi-misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan visinya. Sebagaimana bagian dari visi dan misi-misi tersebut merupakan visi dan misi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Ekonomi makro yang tumbuh berkorelasi positif dengan kenaikan pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini berimplikasi pula dengan semakin besarnya dana yang dapat dialokasikan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk melayani masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan daerah hal tersebut tercermin dengan adanya perubahan APBD. Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur pada tahun ini mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp383.181.094.629 dari anggaran dasarnya yaitu sebesar Rp315.573.968.055 peningkatan anggaran belanja tersebut diharapkan dapat memberikan lebih banyak manfaat kepada masyarakat, dengan pertimbangan tersebut tambahan anggaran yang didapat dialokasikan pada program dan kegiatan sebagai berikut:

Anggaran Perubahan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp383.161.994.699,00 sebagaimana rincian diatas, mengalami penurunan sebesar Rp2.743.154.787,00 atau sebesar 0,71% bila dibandingkan anggaran tahun lalu yaitu Rp385.905.149.486,00 Penurunan merupakan efisiensi anggaran dikarenakan kembalinya pulih penkonomiean bidang makro maupun mikro di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sehingga untuk menggerakan perekonomian dengan cepat dengan tujuan menyelamatkan dengan misi-misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pencapaian visinya di tahun 2024

2.2 Kebijakan Keuangan

Pengelolaan keuangan haruslah didasarkan pada prinsip efektif, efisien dan akuntabilitas (pertanggungjawaban). Efektivitas bermakna bahwa segala sumber daya (aset manusia dan aset tatar/ kas) yang ada hendaknya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana yang dijadikan indikator keluaran di DPA. Efisien diartikan penggunaan sumberdaya harus seminimum mungkin dalam mencapai tujuan. Melalui ketiga prinsip tersebut diharapkan anggaran yang diamanahkan dapat memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat. Dalam hal pertanggungjawaban (akuntabel), pengelola keuangan dituntut dapat mengetahui, mengelola dan menjelaskan penggunaan dana yang telah diamanahkan sebagaimana yang tertuang di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Realisasi pelaksanaan anggaran secara garis besar tercermin pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan Neraca menggambarkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas per tanggal tertentu. Realisasi belanja pada tahun ini adalah sebesar Rp357.015.034.763 nilai ini mendekati dari targetnya sebesar Rp383.161.994.699,00 atau sebesar 93,18%. Bila dibandingkan pada tahun lalu realisasi belanja tahun 2023 sebesar Rp365.402.104.281,00 dengan nilai target sebesar Rp385.905.149.486,00 atau sebesar 94,69% maka dapat diketahui terjadi penurunan sebesar Rp2.743.154.787,00 atau sebesar 0,71%. Adapun penjelasan Atas kenaikan/penurunan belanja akan dijabarkan pada Bab V.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur memiliki target kinerja dalam program dan kegiatan yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel II
INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Laporan Capaian Kinerja Tahun 2024

No Urut	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Detail	Target Kinerja	Pencapaian Kinerja	Persentase Kinerja	Pesilbab
4.01.01.1.01.0000							
4.01.01.1.01.0001	Pengusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1,20	1,20	100%	5*
4.01.01.1.01.0002	Integrasi dan Penyusunan Dokumen RRA-SRPD	Jumlah Dokumen RRA-SRPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RRA-SRPD	Dokumen	1,20	1,20	100%	5*
4.01.01.1.01.0003	Kelembutan dan Penyusunan DPA-SRPD	Jumlah Dokumen DPA-SRPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SRPD	Dokumen	1,00	1,00	100%	5*
4.01.01.1.01.0004	Kelembutan dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SRPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SRPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SRPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SRPD	Laporan	1,00	1,00	100%	5*
4.01.01.1.01.0005	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1,00	1,00	100%	5*
4.01.01.1.02.0000							
4.01.01.1.02.0001	Pengadaan SDA dan Tanggapan SDA	Jumlah Orang yang Menervisi Kegiatan Tanggapan SDA	Orang/Kelompok	980,00	980,00	100%	5*
4.01.01.1.02.0002	Pengadaan Administrasi Pelaksanaan Tugas SDA	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Pelaksanaan Tugas SDA	Dokumen	12,00	12,00	100%	5*
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Pelaksanaan dan Pengawasan/Verifikasi Kegiatan SRPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan/Verifikasi Kegiatan SRPD	Dokumen	12,00	12,00	100%	5*
4.01.01.1.02.0004	Pengawasan dan Pemantauan Pelaksanaan dan Tanggapan Pemeliharaan	Jumlah Dokumen Hasil Tanggapan Pemeliharaan dan Triak Lanjut Pemeliharaan	Dokumen	1,00	1,00	100%	5*
4.01.01.1.02.0005	Kelembutan dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SRPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SRPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SRPD	Laporan	12,00	12,00	100%	5*
4.01.01.1.03.0000							
4.01.01.1.03.0001	Pengawasan Pelaksanaan Realisasi Kinerja SRPD	Jumlah Dokumen Realisasi Kinerja SRPD dan Laporan SRPD	Dokumen	1,00	1,00	100%	5*
4.01.01.1.03.0002	Pengawasan Kinerja SRPD	Jumlah Dokumen Pengawasan Kinerja SRPD dan Laporan SRPD	Dokumen	4,00	4,00	100%	5*
4.01.01.1.03.0003	Kelembutan dan Penyusunan Laporan Kinerja SRPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja SRPD	Jumlah Laporan Realisasi Kinerja SRPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja SRPD	Laporan	4,00	4,00	100%	5*
4.01.01.1.04.0000							

Selamat pagi Pak! Jarak dan Waktu Temu

[illegible]

Kategori		Kategori		Kategori		Kategori	
4.01.02.1.01.0001	Pembinaan dan Pemeliharaan Program Pemberdayaan Peternak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pemeliharaan Program Pemberdayaan Peternak Daerah	Dokumen	1,00	1,00	100	57
4.01.02.1.01.0002	Pembinaan Kandang Petak	Jumlah Dokumen Hasil Pemeliharaan Kandang Petak	Dokumen	10,00	4,00	40	58
4.01.02.1.01.0003	Peningkatan Kualitas Perawatan Hewan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kualitas Perawatan Hewan	Dokumen	3,00	3,00	3	58
4.01.02.1.01.0004	Facilitas Pemeliharaan Hewan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Fasilitas dan Kandang Hewan Peternakan	Dokumen	2,00	1,00	100	57
4.01.02.1.01.0005	Pembinaan Tata Kelola DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Kelola DPRD yang Efektif	Dokumen	1,00	1,00	100	57
4.01.02.1.01.0006	Solusi Pemeliharaan Hewan yang Didukung Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Pemeliharaan Hewan yang Didukung Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Dokumen	42.000,00	42.000,00	42,45	5
4.02.02.1.02.0001	Pembinaan RUK dan PPK	Jumlah Dokumen Hasil Pemeliharaan RUK dan PPK	Dokumen	1,00	1,00	100	57
4.02.02.1.02.0002	Pembinaan Pemeliharaan RUK dan Pemeliharaan PPK	Jumlah Dokumen Hasil Pemeliharaan Pemeliharaan RUK dan Pemeliharaan PPK	Dokumen	1,00	1,00	100	57
4.02.02.1.02.0003	Pembinaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pemeliharaan APBD	Dokumen	1,00	1,00	100	57
4.02.02.1.02.0004	Pembinaan Pemeliharaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pemeliharaan Pemeliharaan APBD	Dokumen	1,00	1,00	100	57
4.02.02.1.02.0005	Pembinaan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pemeliharaan Laporan Semester	Dokumen	1,00	1,00	100	57
4.02.02.1.02.0006	Pembinaan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pemeliharaan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1,00	1,00	100	57
4.03.02.1.03.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	12,00	12,00	100	57
4.03.02.1.03.0002	Pengawasan Kinerja Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	12,00	12,00	100	57
4.03.02.1.03.0003	Pengawasan Kinerja Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	12,00	12,00	100	57
4.03.02.1.03.0004	Pengawasan Kinerja Pemerintahan Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintahan Bidang Pemerintahan	Laporan	12,00	12,00	100	57
4.03.02.1.03.0005	Pengawasan Kinerja Laporan Hasil Pemeliharaan Laporan Keuangan dan Badan Penyelenggara Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pemeliharaan Laporan Keuangan dan Badan Penyelenggara Keuangan	Dokumen	1,00	1,00	100	57
4.03.02.1.03.0006	Pengawasan Kinerja Laporan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pemeliharaan Anggaran	Dokumen	1,00	1,00	100	57
4.03.02.1.03.0007	Pembinaan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pemeliharaan Laporan Keuangan	Dokumen	1,00	1,00	100	57
4.04.02.1.04.0001	Orang-orang DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pemeliharaan Orang-orang DPRD	Dokumen	1,00	1,00	100	57
4.04.02.1.04.0002	Pembinaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pemeliharaan Tugas DPRD	Dokumen	1,00	1,00	100	57

4.01.02.1.04.0004	Penyediaan Kebutuhan Peralat dan Tisu AMB	Jumlah Uang dalam Kebutuhan Peralat dan Tisu AMB	Drng	20,00	20,00	100	0
4.01.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Pabrik	Jumlah Tenaga ahli Pabrik	Drng	8,00	7,00	87,5	1
4.01.02.1.04.0006	Pengembangan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Hubungan Masyarakat	Dokumen	1,00	1,00	100	0
4.01.02.1.04.0007	Pengurusan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	1,00	1,00	100	0
4.01.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	25,00	22,00	88	2
4.01.02.1.04.0009	Penyediaan Kebutuhan Peralat dan Tisu AMB	Jumlah Uang dalam Kebutuhan Peralat dan Tisu AMB	Drng	20,00	20,00	100	0
4.01.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	40,00	40,00	100	0
4.01.02.1.05.0002	Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan DPRD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan DPRD yang Ditinjau	Dokumen	1,00	1,00	100	0
4.01.02.1.05.0003	Pemantauan Belanja	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan Belanja	Dokumen	3,00	2,00	66,67	1
4.01.02.1.05.0004	Penyediaan Kebutuhan Peralat dan Tisu AMB	Jumlah Uang dalam Kebutuhan Peralat dan Tisu AMB	Drng	20,00	20,00	100	0
4.01.02.1.06.0001	Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan DPRD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan DPRD yang Ditinjau	Dokumen	1,00	1,00	100	0
4.01.02.1.06.0002	Pengawasan Kerja Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kerja Etik DPRD	Laporan	1,00	1,00	100	0
4.01.02.1.06.0003	Penyediaan Kebutuhan Peralat dan Tisu AMB	Jumlah Uang dalam Kebutuhan Peralat dan Tisu AMB	Drng	20,00	20,00	100	0
4.01.02.1.07.0001	Facilitas, Verifikasi, dan Koordinasi Pemantauan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Akomodasi Hasil Fasilitas, Verifikasi, dan Koordinasi Pemantauan Kerja Sama Daerah	Dokumen	4,00	4,00	100	0
4.01.02.1.07.0002	Pemantauan Belanja Komunitas dan Publikasi	Jumlah Dokumen Belanja Komunitas dan Publikasi yang Ditinjau	Dokumen	12,00	12,00	100	0
4.01.02.1.07.0003	Penyediaan Kebutuhan Peralat dan Tisu AMB	Jumlah Uang dalam Kebutuhan Peralat dan Tisu AMB	Drng	20,00	20,00	100	0
4.01.02.1.08.0001	Kemampuan dan Akomodasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Kemampuan dan Akomodasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	12,00	12,00	100	0
4.01.02.1.08.0002	Pengawasan Laporan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Kerja, Akomodasi dan Kerja DPRD yang Ditinjau	Laporan	3,00	3,00	100	0
4.01.02.1.08.0003	Facilitas Pelaksanaan Tugas Belanja Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Belanja Masyarakat	Dokumen	4,00	4,00	100	0
4.01.02.1.08.0004	Facilitas Tugas Pemantauan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tugas Pemantauan DPRD	Dokumen	12,00	12,00	100	0
4.01.02.1.08.0005	Facilitas Pelaksanaan Tugas Fasilitas Peralat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Fasilitas Peralat	Dokumen	4,00	4,00	100	0

Dalam pencapaian target-target tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya menjaga efektivitas (tercapainya target) dan efisiensi (kemurnaan penggunaan dana) anggaran. Efektivitas dan efisiensi senantiasa dipantau melalui evaluasi berkala secara internal di Dinas dan evaluasi berkala melalui Evaluasi Dokumen Perencanaan (EVDOREN) dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) dan Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalog) dengan Tim Asistensi Pemerintah Daerah (TAPD). Efektif diukur dengan tercapainya tidaknya target yang ditetapkan, sedangkan efisiensi diukur dengan seberapa besar

dana yang digunakan dalam pencapaian tujuan. Hasil efektivitas dan efisiensi yang telah diupayakan pada tahun 2024 akan dijelaskan secara rinci pada Bab III.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Capaian target kinerja keuangan pada tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur**

- Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan sebesar Rp182.654.107.751,00 pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp176.501.578.064,00 atau 96,63%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp6.152.529.687,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

- *Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp2.220.721.670,00. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp1.750.949.865,00 atau 78,85%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp469.771.805,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

- *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp452.028.500,00. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp405.134.336,00 atau 89,63%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp46.894.164,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

- *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp563.461.200,00. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp513.267.891,00 atau 91,09%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp50.193.309,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ **Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD**

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp110.914.470,00 Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp109.799.000,00 atau 98,99%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.115.470,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp590.563.000,00 Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp393.796.838,00 atau 65,68%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp205.766.162,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp494.754.900,00 Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp328.951.900,00 atau 66,49%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp165.802.600,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain karena evaluasi untuk triwulan 3 dan 4 tidak dilaksanakan dan baru dilakukan pada bulan Januari 2025 oleh Tim Evaluator RKPD.

➤ **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp18.229.653.481,00 Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp17.648.519.921,00 atau 93,52%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.181.133.560,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp15.653.217.431,00 Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp14.801.618.787,00 atau 94,56%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp851.598.644,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ *Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.078.948.200,00. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp1.050.680.147,00 atau 97,38%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp28.268.053,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ *Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp565.052.250,00. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp426.748.503,00 atau 75,52%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp138.303.947,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ *Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp376.051.200,00. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp236.069.462,00 atau 62,78%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp139.981.738,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp556.384.400,00. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp533.403.222,00 atau 95,87%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp22.981.178,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

• **Administrasi Barang Milik Daerah**

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp839.902.400,00 dan terealisasi sebesar Rp798.495.825,00 atau 95,07%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp41.406.575,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ *Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp138.660.000,00 dan terealisasi sebesar Rp74.020.000,00 atau 53,38%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp64.640.000,00 hal ini disebabkan karena rapat kerja

penyusunan kebutuhan barang terlaksana 1 Kali di dalam daerah pada kegiatan tersebut.

➤ ***Penggunaan Barang Milik Daerah***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp874.676.500,00 dan terealisasi sebesar Rp847.777.714,00 atau 96,92%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp26.898.786,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ ***Rekonstruksi dan Penggunaan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp123.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp105.454.000,00 atau 85,32%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp18.146.000,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

- **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Pada kegiatan ini Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp2.507.089.500,00 dan terealisasi sebesar Rp2.334.130.633,00 atau 93,10%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp172.958.865,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ ***Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp53.604.000,00 dan terealisasi sebesar Rp49.378.000,00 atau 92,12%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.226.000,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ ***Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp816.222.500,00 dan terealisasi sebesar Rp782.984.000,00 atau 95,93%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp33.238.500,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ ***Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp300.528.000,00 dan terealisasi sebesar Rp292.027.400,00 atau 97,17%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp8.500.600,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ ***Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp61.050.000,00 dan terealisasi sebesar Rp41.280.080,00 atau 67,62%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp19.769.920,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ ***Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp284.230.000,00 dan terealisasi sebesar Rp274.776.806,00 atau 96,67%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp9.453.194,00 hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ ***Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp545.746.000,00 dan terealisasi sebesar Rp516.164.589,00 atau 94,58%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp29.581.411,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ ***Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp291.573.000,00 dan terealisasi sebesar Rp285.520.000,00 atau 97,92%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 6.053.000,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ ***Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp291.573.000,00 dan terealisasi sebesar Rp91.999.760,00 atau 31,56%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp199.573.240,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp7.299.376.844,00 dan terealisasi sebesar Rp7.162.985.568,00 atau 98,13%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp136.391.276,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ ***Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp443.494.000,00 dan terealisasi sebesar Rp443.330.000,00 atau 99,96%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp164.000,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ ***Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp2.702.437.544,00 dan terealisasi sebesar Rp2.672.503.000,00 atau 98,89%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp29.934.544,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ ***Penyediaan Peralatan Rumah Tangga***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.730.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.741.494.250,00 atau 99,51%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp8.505.750,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ ***Penyediaan Bahan Logistik Kantor***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp968.782.300,00 dan terealisasi sebesar Rp947.645.000,00 atau 97,83%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp21.057.300,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ ***Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp478.335.500,00 dan terealisasi sebesar Rp478.200.000,00 atau 99,97%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp135.500,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ ***Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp5.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.995.000,00 atau 96,06%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp205.000,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ ***Pengelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp718.872.500,00 dan terealisasi sebesar Rp644.791.615,00 atau 89,69%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp74.080.885,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ ***Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp232.335.000,00 dan terealisasi sebesar Rp230.026.703,00 atau 99,01%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.308.297,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

- ***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp24.744.040.330,00 dan terealisasi sebesar Rp23.590.285.521,00 atau 95,34%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.153.754.809,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ ***Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinamis Kendaraan Dinas Jabatan***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp3.562.789.600,00 dan terealisasi sebesar Rp3.504.000.000,00 atau 98,35%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp58.789.600,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ ***Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp6.851.257.100,00 dan terealisasi sebesar Rp6.588.107.891,00 atau 96,16%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp263.149.209 walaupun terdapat sisa anggaran

namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ ***Pengadaan Mebel***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp998.047.000,00 atau 99,80%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.953.000,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ ***Pengadaan Perlengkapan dan Mesin Lainnya***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp4.546.949.600,00 dan terealisasi sebesar Rp4.540.600.000,00 atau 97,71%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp6.349.600,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ ***Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp8.883.044.030,00 dan terealisasi sebesar Rp7.959.530.630,00 atau 91,67%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp923.513.400,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

- ***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp25.921.757.985,00 dan terealisasi sebesar Rp24.519.688.751,00 atau 94,59%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.402.069.234,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ ***Penyediaan Jasa Surat Menyurat***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp74.360.000,00 dan terealisasi sebesar Rp42.927.900,00 atau 57,72%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp31.432.100,00 hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ ***Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp6.075.760.800,00 dan terealisasi sebesar Rp4.921.393.002,00 atau 81,00%. Terdapat sisa

anggaran sebesar Rp1.134.367.798,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ *Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp957.806.745,00 dan terealisasi sebesar Rp950.269.000,00 atau 99,21%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp7.537.745,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp18.813.830.440,00 dan terealisasi sebesar Rp18.605.098.840,00 atau 98,89%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp208.731.591,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp9.922.272.100,00 dan terealisasi sebesar Rp9.847.002.714,00 atau 99,24%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp75.269.386,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Jabatan*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 745.898.000,00 dan terealisasi sebesar Rp685.164.826,00 atau 91,86%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp60.733.174,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.765.034.200,00 dan terealisasi sebesar Rp1.755.712.691,00 atau 94,83%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp9.321.509,00 walaupun terdapat sisa anggaran

namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ ***Pemeliharaan Mebel***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp9.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp9.750.000,00 atau 100%.

➤ ***Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp2.898.302.700,00 dan terealisasi sebesar Rp2.895.445.475,00 atau 99,90%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.857.225,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ ***Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp2.302.822.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.302.759.914,00 atau 100%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp62.086,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ ***Pemeliharaan Aset Tak Berwujud***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp60.198.000,00 dan terealisasi sebesar Rp60.000.000,00 atau 100%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp198.000,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ ***Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.760.267.200,00 dan terealisasi sebesar Rp1.760.178.874,00 atau 99,99%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp88.326,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ ***Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp199.960.934,00 atau 99,98%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp39.066,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ *Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantoratan Bangunan Lainnya*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp180.000.000,00 dan terrealisasi sebesar Rp178.050.000,00 atau 98,92%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.950.000,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

- **Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp53.887.817.516,00 dan terrealisasi sebesar Rp52.478.200.954,00 atau 97,38%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.409.616.562,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ *Pengelolaan Administrasi Keuangan DPRD*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp51.616.721.766,00 dan terrealisasi sebesar Rp50.651.399.410,00 atau 98,13%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp965.322.356,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ *Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.657.603.750,00 dan terrealisasi sebesar Rp1.580.500.000,00 atau 95,35%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp77.103.750,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ *Pelaksanaan Medical Check Up DPRD*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp613.492.000,00 dan terrealisasi sebesar Rp346.501.544,00 atau 40,15%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp367.190.456,00 hal ini disebabkan karena jadwal kegiatan ke depannya yang padat.

- **Layanan Administrasi DPRD**

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp36.784.441.825,00 dan terrealisasi sebesar Rp36.742.562.421,00 atau 99,89%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp41.879.404,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang

telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ ***Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp904.738.625,00 dan terealisasi sebesar Rp867.703.030,00 atau 95,91%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp37.035.595,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ ***Fasilitasi Fraksi DPRD***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp195.108.000,00 dan terealisasi sebesar Rp195.070.000,00 atau 99,98%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp38.000,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ ***Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp20.771.395.200,00 dan terealisasi sebesar Rp 20.768.084.391,00 atau 99,98%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.310.809,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ ***Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp14.912.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp14.911.705.000,00 atau 99,99%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp495.000,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

• **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi**

Pada Program ini Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan sebesar Rp200.507.886.948 pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD diatas anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp180.513.456.699 atau 90,03%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp19.994.430.249,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

- **Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp26.018.393.600,00 dan terealisasi sebesar Rp22.932.775.325,00 atau 88,14%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.085.618.275,00 hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ *Pengusunan dan Pembahasan Program Penentuan Peraturan Daerah*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp5.772.695.800,00 dan terealisasi sebesar Rp4.403.032.514,00 atau 76,27%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.369.663.286,00 hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ *Pembahasan Rancangan Perda*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp819.019.500,00 dan terealisasi sebesar Rp781.940.500,00 atau 95,47%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp37.079.000,00 hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ *Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp656.558.800,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 656.558.800,00 tidak terlaksana dikarenakan tidak ada kasus hukum yang perlu dikaji.

➤ *Fasilitasi Pengumpulan Naskah Akademik*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp592.536.000,00 dan terealisasi sebesar Rp578.180.000,00 atau 97,58%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp14.356.000,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ *Pengusunan Tata Tertib DPRD*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp271.580.000,00 dan terealisasi sebesar Rp167.085.234,00 atau 61,52%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp104.494.766,00 hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ ***Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp17.906.003.500,00 dan terrealisasi sebesar Rp17.002.537.077,00 atau 94,95%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp903.466.423,00 hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

- **Pembahasan Kebijakan Anggaran**

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp7.639.657.500,00 dan terrealisasi sebesar Rp5.013.628.441,00 atau 65,65%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.624.029.059,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ ***Pembahasan KUA dan PPAS***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.248.315.500,00 dan terrealisasi sebesar Rp1.104.592.276,00 atau 88,49%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp143.723.224,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ ***Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp975.665.500,00 dan terrealisasi sebesar Rp355.399.024,00 atau 36,43%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp620.466.476,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan karena pembahasan dilakukan lebih awal. Tahapan pembahasan dilakukan percepatan termasuk kesepakatan dan persetujuan bersama antara Pemerintah dan DPRD.

➤ ***Pembahasan APBD***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.517.155.500,00 dan terrealisasi sebesar Rp925.201.588,00 atau 60,98%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp591.953.912,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan karena pembahasan dilakukan lebih awal. Tahapan pembahasan dilakukan percepatan termasuk kesepakatan dan persetujuan bersama antara Pemerintah dan DPRD.

➤ **Pembahasan Perubahan APBD**

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.462.380.500,00 dan teralisasi sebesar Rp1.207.871.013,00 atau 82,60%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 254.509.487,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ **Pembahasan Laporan Semester**

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp966.025.000,00 dan teralisasi sebesar Rp324.280.382,00 atau 33,57%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp641.744.618,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai hal ini disebabkan karena pembahasan dilakukan lebih awal. Talipan pembahasan dilakukan percepatan termasuk kesepakatan dan persetujuan bersama antara Pemerintah dan DPRD.

- **Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp22.752.133.320,00 dan teralisasi sebesar Rp20.463.760.728,00 atau 89,94%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.288.374.592,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ **Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum**

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp3.637.442.000,00 dan teralisasi sebesar Rp3.046.173.736,00 atau 83,74%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp591.268.264,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan karena pembentukan Alat Kelengkapan DPRD yang semula dijadwalkan pada Bulan Oktober diundur menjadi Bulan Desember (hasil kesepakatan pada Rapat Pimpinan DPRD). Sehingga rencana kegiatan Kunjungan Kerja pada Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum yang seharusnya dapat dilakukan oleh Komisi I DPRD tidak terlaksana pada bulan Oktober - November.

➤ **Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur**

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp5.088.131.000,00 dan teralisasi sebesar Rp5.068.720.898,00 atau 99,62%. Terdapat sisa

anggaran sebesar Rp19.410.102,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai. Hal ini disebabkan karena pembentukan Alat Kelengkapan DPRD yang semula dijadwalkan pada Bulan Oktober diundur menjadi Bulan Desember (hasil kesepakatan pada Rapat Pimpinan DPRD). Sehingga rencana kegiatan Kunjungan Kerja pada sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur yang seharusnya dapat dilakukan oleh Komisi III DPRD tidak terlaksana pada bulan Oktober - November.

➤ ***Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp5.327.131.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.977.283.109,00 atau 89,48%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp549.847.891,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai. Hal ini disebabkan karena pembentukan Alat Kelengkapan DPRD yang semula dijadwalkan pada Bulan Oktober diundur menjadi Bulan Desember (hasil kesepakatan pada Rapat Pimpinan DPRD). Sehingga rencana kegiatan Kunjungan Kerja pada sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang seharusnya dapat dilakukan oleh Komisi IV DPRD tidak terlaksana pada bulan Oktober - November.

➤ ***Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp278.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp26248.543.822,00 atau 89,37%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp29.556.178,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai. Hal ini disebabkan karena pembentukan Alat Kelengkapan DPRD yang semula dijadwalkan pada Bulan Oktober diundur menjadi Bulan Desember (hasil kesepakatan pada Rapat Pimpinan DPRD). Sehingga rencana kegiatan Kunjungan Kerja pada sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan yang seharusnya dapat dilakukan oleh Komisi II DPRD tidak terlaksana pada bulan Oktober - November.

➤ ***Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.028.705.500,00 dan terealisasi sebesar Rp790.398.772,00 atau 76,83%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp238.306.728,00 walaupun terdapat sisa anggaran

namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ ***Pengawasan Penggunaan Anggaran***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp3.988.512.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.401.738.096,00 atau 85,29%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp586.773.904,00 hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ ***Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.624.083.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.620.165.666,00 atau 99,76%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.917.334,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

- ***Peningkatan Kapasitas DPRD***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp90.365.834.397,00 dan terealisasi sebesar Rp87.068.660.259,00 atau 96,35%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.297.174.138,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ ***Orientasi DPRD***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.134.420.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.042.534.848,00 atau 91,90%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 91.885.152,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ ***Pendahuluan Tugas DPRD***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp4.290.465.041,00 dan terealisasi sebesar Rp3.451.476.777,00 atau 80,45%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp838.988.264,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ **Publikasi dan Dokumentasi DPRD**

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp64.740.083.356,00 dan terealisasi sebesar Rp64.509.819.982,00 atau 99,64%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp230.263.374,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ **Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli**

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.950.358.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.402.858.000,00 atau 71,93%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp547.500.000,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan karena pada triwulan IV AKD belum terbentuk sehingga tidak semua kelompok pakar dan tim ahli yang dibayar.

➤ **Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi**

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp780.358.000,00 dan terealisasi sebesar Rp645.358.000,00 atau 82,70%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp135.000.000,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ **Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat**

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp15.857.150.000,00 dan terealisasi sebesar Rp14.501.829.436,00 atau 91,45%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.355.320.564,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan ada beberapa anggota DPRD yang tidak melaksanakan kegiatan tersebut.

➤ **Penyusunan Program Kerja DPRD**

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.613.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.514.783.216,00 atau 93,91%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp98.216.784,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

- **Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp21.772.586.400,00 dan terealisasi sebesar Rp20.654.277.067,00 atau 94,86%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.118.309.333,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang

telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ *Kunjungan Kerja Dalam Daerah*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp4.373.167.500,00 dan terealisasi sebesar Rp4.033.715.881,00 atau 92,24%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp339.451.619,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ *Penyusunan Pokok-Pokok Pidana*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.908.900.900,00 dan terealisasi sebesar Rp1.899.963.480,00 atau 99,53%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp8.937.420,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ *Pelaksanaan Reses*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp15.490.518.000,00 dan terealisasi sebesar Rp14.720.597.706,00 atau 95,03%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp769.920.294,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

- **Pelaksanaan Kode Etik DPRD**

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.867.919.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.642.613.592,00 atau 87,94%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp225.305.408,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ *Penyusunan Kode Etik DPRD*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp315.536.000,00 dan terealisasi sebesar Rp290.464.613,00 atau 92,05%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp25.071.387,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ *Pengawasan Kode Etik DPRD*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.552.383.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.352.148.979,00 atau 87,10%. Terdapat sisa

anggaran sebesar Rp200.234.021,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

- *Pembahasan Kerja Sama Daerah*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.182.754.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.080.144.056,00 atau 91,32%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp102.609.944,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ *Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp431.686.000,00 dan terealisasi sebesar Rp380.739.149,00 atau 88,20%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp50.946.851,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ *Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp751.068.000,00 dan terealisasi sebesar Rp699.404.907,00 atau 93,12%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp51.663.093,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

- *Fasilitasi Tugas DPRD*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp28.908.606.731,00 dan terealisasi sebesar Rp21.655.597.231,00 atau 74,91%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp7.253.009.500,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ *Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp13.982.755.831,00 dan terealisasi sebesar Rp10.024.997.703,00 atau 71,70%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.957.421.571,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan Kegiatan kunjungan kerja Luar Negeri yang akan dilaksanakan oleh

DPRD Provinsi Kalimantan Timur sebelumnya ditolak oleh Sekretaris Jenderal KEMENDAGRI dengan alasan undangan tidak Valid

➤ ***Penyusunan Laporan Kinerja DPRD***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp59.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp59.166.000,00 atau 99,61%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp234.000,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ ***Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp5.675.820.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.860.281.552,00 atau 68,01%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.815.538.448,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan karena AKD belum terbentuk.

➤ ***Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp346.743.000,00 dan terealisasi sebesar Rp338.076.632,00 atau 90,94%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp8.666.368,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada kegiatan tersebut.

➤ ***Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp8.796.887.900,00 dan terealisasi sebesar Rp7.353.075.344,00 atau 83,59%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.443.812.556,00 walaupun terdapat sisa anggaran namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan didalamnya terdapat kegiatan diseminasi, dari 3 panitia ranperda hanya 1 panitia khusus yg melaksanakan Sisa anggaran lainnya di manfaatkan pada panrus non ranperda yang di bentuk oleh anggota periode 2024-2029.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Meskipun target yang telah ditetapkan tercapai namun dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi, antara lain:

- Kekurangan personil teknis karena banyak yang telah pensiun sementara belum ada tenaga pengganti.

- Petinggi teknis yang seringkali berubah.
- Adanya perbedaan antara Anggota DPRD tahun 2019 – 2024 ke Anggota DPRD yang baru tahun 2025-2029
- Adanya keterlambatan dalam terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan.
- Faktor sumber yang tidak mendukung seringkali dijumpai saat melaksanakan kegiatan pemantauan (*monitoring*).

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. SEKRETARIAT DPRD Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangannya dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), tidak bertindak selaku pengkonsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD.

4.2 Basis Akuntansi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 20 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024. SEKRETARIAT DPRD Provinsi Kalimantan Timur selaku entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maka mengacu pada kebijakan akuntansi yang sama. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhitungkan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran

Pengukuran merupakan proses penentuan nilai yang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Basis pengukuran yang digunakan adalah nilai historis.

Masa penutupan adalah satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari 2023 dan berakhir 31 Desember 2023. Mata uang yang digunakan adalah Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

Penerapan kebijakan akuntansi berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, laporan keuangan diharapkan semakin berkualitas sehingga keputusan yang diambil tepat.

4.4.1 Penggunaan aplikasi berbasis sistem informasi

Kebutuhan untuk pertanggungjawaban menuntut proses pengelolaan keuangan yang dimulai anggaran, penatausahaan dan pembukuan harus terintegrasi dan memiliki rekam jejak transaksi. Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk menjamin terintegrasinya ketiga proses dan terlakainya jejak transaksi maka digunakan aplikasi-aplikasi berbasis sistem informasi. Dalam penyusunan laporan keuangan ini, SEKRETARIAT DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggunakan beberapa aplikasi berbasis sistem informasi, yaitu:

- Aplikasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Aplikasi ini dipergunakan untuk penganggaran, penatausahaan dan pembukuan (penyajian laporan keuangan)
- Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah (BMD)
Aplikasi ini dipergunakan untuk penatausahaan aset tetap dan aset tidak berwujud.
- Aplikasi Sistem Informasi Kaitin untuk Aset Persediaan (SIKAP)
Aplikasi ini dipergunakan untuk penatausahaan persediaan.

4.4.2 Definisi, Pengakuan dan Pengukuran Akun Laporan Keuangan

4.4.2.1 Pendapatan – LRA

- Definisi

Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Dalam hal ini kas di bendahara penerimaan termasuk bagian dari Kas Umum Daerah.

- Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas/atas pendapatan tersebut telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau Bendahara Penerimaan/atas entitas dengan pengesahan oleh BUD.

- Pengukuran

Pendapatan -LRA dicatat sebesar nilai bruto yang diterima

4.4.2.2 Belanja

- Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali.

- Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerahnya telah disahkan oleh fungsi perbendaharaan.

- Pengukuran

Belanja dicatat sebesar nilai bruto yang telah dikeluarkan.

Belanja diklasifikasikan menjadi belanja operasional, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Masing-masing jenis belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.
- Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
- Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

4.4.2.3 Pendapatan - LO

- Definisi

Pendapatan-LO adalah hak yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak/atas pendapatan tersebut ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

- Pengukuran

Pendapatan-LO diukur berdasarkan nilai yang menjadi hak dan menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan sebesar nilai bruto. Apabila pendapatan-LO yang diterima berupa barang/ jasa dinilai sebesar harga perolehannya nilai wajar pada tanggal transaksi dan mengungkapkannya di Cat.K.

- Penyajian

Pendapatan-LO disajikan di Laporan Operasional dengan mengklasifikasikannya berdasarkan sumber pendapatannya yaitu:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Pendapatan Transfer
- Lain-Lain Pendapatan yang Sah

4.4.2.4 Beban

- Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Pengakuan

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

- Pengukuran

Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset atau terjadinya timbul kewajiban atau penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa pada periode tahun berkenaan. Transaksi beban dalam bentuk barang/ jasa dinilai sebesar perolehannya nilai wajar pada tanggal transaksi dan mengungkapkannya di Cat.K.

- Penyajian

Beban disajikan di Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi ekonominya yaitu:

- Beban Pegawai
- Beban Barang dan Jasa
- Beban Bangun
- Beban Subsidi
- Beban Hibah
- Beban Bantuan Sosial
- Beban Bantuan Keuangan

- Beban Penyusutan dan Amortisasi
- Beban Penyisihan Piutang
- Beban Lain-Lain
- Beban Transfer
- Beban Luar Biasa

4.4.2.5 Aset

-Defenisi

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa datang serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumberdaya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan kedalam 2 kategori, yaitu:

-Aset lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera dapat dicairkan atau dimiliki untuk dipakainya dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, piutang, persediaan, beban dibayar dimuka dan asuransi dibayar dimuka.

-Aset nonlancar

Selain aset lancar maka termasuk sebagai aset nonlancar. Aset nonlancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya.

-Pengakuan

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan handulitas, pada saat ditentukan kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

-Pengukuran

Sehubungan berbeda-bedanya karakteristik antarjenis aset maka pengukuran masing-masing jenis aset dapat berbeda sebagai berikut:

- Kas dan setara diukur sebesar nilai nominalnya.
- Persediaan diukur sebesar nilai pembeliannya bila diperoleh dengan cara membeli, sebesar nilai standar bila dihasilkan dengan memproduksi sendiri dan sebesar nilai wajar bila diperoleh dari donasi atau rampasan. Pada saat disajikan pada akhir tahun maka dilakukan perhitungan secara periodik dengan metode FIFO (First in First out).

- Piutang diukur sebesar nilai yang menjadi hak pemerintah daerah. Pada saat penyajian di neraca maka ia dinilai sebesar nominal yang dapat direalisasikan (nilai nominal dikurangi nilai penyisihan piutang)
- Beban dibayar dimuka diukur sebesar nilai teresa yang masih memiliki manfaat ekonomi/ sosial di tahun mendatang.
- Investasi jangka pendek diukur sebesar nilai perolehan atau nilai wajarnya
- Investasi jangka panjang dinilai sebesar nilai perolehannya, apabila tidak diketahui nilai perolehannya maka menggunakan nilai wajar.
- Aset tetap dinilai sebesar harga perolehannya, bila tidak dimungkinkan didapat data harga perolehan maka digunakan nilai wajar. Seluruh biaya yang timbul setelah aset tetap tersebut diperoleh dapat dikapitalisasi bila seluruh persyaratan dibawah ini terpenuhi:
- Meningkatkan kapasitas/ volume atau memperpanjang masa manfaat atau menambah fungsi atau peningkatan standar kinerja dan;
- Nilai satuan minimum kapital aset tetap terpenuhi, yaitu:
- Perolehan konstruksi sebesar Rp20.000.000 ke Atas
- Perolehan peralatan dan mesin sebesar Rp1.500.000 ke Atas
- Aset tidak berwujud diukur sebesar nilai perolehannya, bila diperoleh secara ryakelola maka diukur dengan mengomlahkan seluruh biaya yang berhubungan langsung dengan aset tersebut.
- Aset lain-lain diukur sebesar nilai perolehannya.

-Penyajian

Aset disajikan di Neraca berdasarkan tingkat likuiditasnya dengan urutan sebagai berikut:

ASET

ASET LANCAR

Kas

- Kas di Kas Daerah
- Kas di Bendahara Penerimaan
- Kas di Bendahara Pengeluaran
- Kas di BLUD
- Kas di Bendahara FKTP
- Kas di Bendahara BOS
- Kas Lainnya
- Semua Kas

Investasi Jangka Pendek

- Investasi Jangka Pendek Lainnya

Piutang Pendapatan

- Piutang Pajak Daerah
- Piutang Retribusi
- Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Piutang Lain-lain PAD yang Sah
- Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
- Piutang Transfer Pemerintah Lainnya
- Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
- Piutang Pendapatan Lainnya

Piutang Lainnya

- Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
- Uang Muka
- Piutang Kegiatan
- Piutang Kelebihan Pungut Pph

Penyisihan Piutang

- Penyisihan Piutang Pendapatan
- Penyisihan Piutang Lainnya

Beban Dibayar Dimuka

- Beban Pegawai Dibayar Dimuka
- Beban Barang Dibayar Dimuka
- Beban Jasa Dibayar Dimuka
- Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka
- Beban Lainnya Dibayar Dimuka

Persediaan

- Persediaan Bahan Pakan Habis
- Persediaan Bahan/Material
- Persediaan Barang Lainnya

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Non Permanen

- Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
- Investasi dalam Obligasi
- Investasi dalam Proyek Pembangunan
- Dana Bergulir
- Deposito Jangka Panjang
- Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi Jangka Panjang Permanen

- Penyerahan Modal Pemerintah Daerah
- Investasi Permanen Lainnya

ASET TETAP

- Tanah
- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- Aset Tetap Lainnya
- Konstruksi Dalam Pengerjaan
- Akumulasi Penyusutan

ASET LAINNYA

Tagihan Jangka Panjang
 Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 Aset Tidak Berwujud
 Goodwill
 Lisensi dan franchise
 Hak Cipta
 Patent
 Aset Tidak Berwujud Lainnya
 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
 Aset Lain-lain
 Aset Lain-lain
 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

4.4.2.6 Kewajiban

-Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

-Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan terjadi pengeluaran sumber daya ekonomi dimasa mendatang akibat kewajiban sekarang dan nilai penyelesaian tersebut dapat diukur dengan handal. Selain itu kewajiban juga dapat diakui pada saat dana pinjaman diterima pada saat timbulnya kewajiban.

-Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

-Penyajian

Kewajiban disajikan di Neraca berdasarkan tingkat kesegeraan pelunasannya dengan rincian sebagai berikut:

• KEWAJIBAN

• KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)
- Utang Bunga
- Bagian Lancir Utang Jangka Panjang
- Pendapatan Diterima Dimuka
- Utang Beban
- Utang Jangka Pendek Lainnya

• KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

- Utang Dalam Negeri
- Utang Jangka Panjang Lainnya

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

Sebagai entitas akuntansi, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam rangka memenuhi amanah tersebut serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas dana yang telah diamanahkan, maka bersama ini akan dijabarkan rincian per laporan keuangan yang merupakan hasil pengelolaan dana tersebut selama Tahun Anggaran 2024.

5.1.1. Pendapatan

Sekretariat DPRD tidak ada Pendapatan yang ditargetkan. Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 telah menargetkan 10 rincian obyek pendapatan, yaitu pendapatan pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah, Transfer pemerintah pusat, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, Bantuan Keuangan, Hibah, Dana Darurat dan Pendapatan Lainnya. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing rincian obyek pendapatan disajikan dalam tabel berikut.

5.1.2. Belanja

Belanja Sekretariat DPRD ditargetkan sebesar Rp383.161.994,699,00 terealisasi sebesar Rp357.015.034.763,00 atau sebesar 93,18%. Nilai ini telah direkonsiliasikan dengan pengeluran di Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) sebagaimana bentuk Rekonsiliasi Belanja terlampir. Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 telah menargetkan dua jenis belanja, yaitu belanja operasional dan belanja modal.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 memiliki 82 (delapan puluh dua) Surat Tanda Setoran dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat Tanda Setoran pengembalian belanja dikarenakan kelebihan sisa perjalanan dinas Tahun 2024, sebagai berikut:

No	Nomor	Uraian	Tanggal	Nilai
1	64.00/07.0/00001/L5/4.02.0.00.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas	06/12/2024	20.000.000
2	64.00/07.0/00004/L5/4.02.0.00.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Pengembalian Sisa Belanja Perjalanan Dinas an. Ananda Emura Moelis ke Jakarta	27/11/2024	1.722.000
3	64.00/07.0/00003/L5/4.02.0.00.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Pengembalian Sisa Belanja Perjalanan Dinas an. Vivi Haryani ke Yogyakarta	27/12/2023	687.000

2. Surat Tanda Setoran pengembalian belanja dikarenakan temuan Inspektorat Prov Kaltim tahun 2024 sebagai berikut :

No	Nomor	Uraian	Tanggal	Nilai
1	0001/ST5/SET.DPRD/2023	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas atas Pemeriksaan Oleh Inspektorat Kwitansi Transport Tidak dapat Diyakini Kebenarannya	09/12/2024	22.738.500
2	0005/ST5/SET.DPRD/2023	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas atas Pemeriksaan oleh Inspektorat Kelebihan Pembayaran Uang Harian	09/12/2024	1.790.000
3	0006/ST5/SET.DPRD/2023	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas atas Pemeriksaan Inspektorat Bill Hotel Tidak Resmi	09/12/2024	219.875.172

3. Surat Tanda Setoran pengembalian belanja dikarenakan sisa pengembalian tambah uang tahun 2024 sebagai berikut :

Nomor	Nomor STS	Keterangan	Nilai (Rp)
1	64.00/07.0/000001/TU/4.02.0.0.0.00.00.04.0000/PR/4/2024	Setor Sisa Tambah Uang Persediaan Sekretariat DPRD	2.363.037,00

		Provinsi Kalimantan Timur	
2	64.00/07.0/000002/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PR/4/2024	Setor Sisa Tambah Uang Persediaan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	73.088.845,00
3	64.00/07.0/000003/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PR/4/2024	Setor Sisa Tambah Uang Persediaan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	4.539.420,00
4	64.00/07.0/000004/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PR/4/2024	Setor Sisa Tambah Uang Persediaan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	91.000,00
5	64.00/07.0/000005/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PR/4/2024	Setor Sisa Tambah Uang Persediaan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	11.046.089,00
6	64.00/07.0/000006/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PR/5/2024	Setor Sisa Tambah Uang Persediaan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	375.000,00
7	64.00/07.0/000007/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PR/5/2024	Setor Sisa Tambah Uang Persediaan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	13.369.618,00
8	64.00/07.0/000008/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PR/5/2024	Setor Sisa Tambah Uang Persediaan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	20.089.054,00
9	64.00/07.0/000009/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PR/5/2024	Setor Sisa Tambah Uang Persediaan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	7.869.759,00
10	64.00/07.0/000010/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PR/6/2024	Setor Sisa Tambah Uang Persediaan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	10.425.534,00
11	64.00/07.0/000011/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PR/7/2024	Setor Sisa Tambah Uang Persediaan Sekretariat DPRD	36.093.420,00

		Provinsi Kalimantan Timur	
12	64.00/07.0/000012/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PR/7/2024	Setor Sisa Tambah Uang Persediaan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	15.968.621,00
13	64.00/07.0/000013/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PR/7/2024	Setor Sisa Tambah Uang Persediaan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	177.015,00
14	64.00/07.0/000014/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PR/7/2024	Setor Sisa Tambah Uang Persediaan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	76.043.514,00
15	64.00/07.0/000015/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PR/8/2024	Setor Sisa Tambah Uang Persediaan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	1.025.000,00
16	64.00/07.0/000016/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PR/8/2024	Setor Sisa Tambah Uang Persediaan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	520.000,00
17	64.00/07.0/000017/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PR/8/2024	Setor Sisa Tambah Uang Persediaan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	3.812.366,00
18	64.00/07.0/000018/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PR/10/2024	Setor Sisa Tambah Uang Persediaan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	369.139.312,00
19	64.00/07.0/000019/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PR/11/2024	Setor Sisa Tambah Uang Persediaan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	27.859.000,00
20	64.00/07.0/000020/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Setor Sisa Tambah Uang Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	551.667.500,00
21	64.00/07.0/000021/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	SETOR PENGEMBALIAN KSA TAMBAH UANG PADA SEKRETARIAT DPRD	74.080.885,00

		PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	
22	64.00/07.0/000022/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	SETOR PENGEMBALIAN SISA TAMBAH UANG PADA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	2.308.297,00
23	64.00/07.0/000023/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	SETOR PENGEMBALIAN SISA TAMBAH UANG PADA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	
24	64.00/07.0/000024/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	SETOR PENGEMBALIAN SISA TAMBAH UANG PADA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	1.115.470,00
25	64.00/07.0/000025/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	SETOR PENGEMBALIAN SISA TAMBAH UANG PADA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	152.400,00
26	64.00/07.0/000026/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	SETOR PENGEMBALIAN SISA TAMBAH UANG PADA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	59.000,00
27	64.00/07.0/000027/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	SETOR PENGEMBALIAN SISA TAMBAH UANG PADA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	300.000,00
28	64.00/07.0/000028/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	SETOR PENGEMBALIAN SISA TAMBAH UANG PADA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	1.508.053,00
29	64.00/07.0/000029/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	SETOR PENGEMBALIAN SISA TAMBAH UANG PADA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	3.827.351,00

30	64.00/07.0/000030/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	SETOR PENGEMBALIAN SISA TAMBAH UANG PADA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	3.644.000,00
31	64.00/07.0/000031/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Setor Sisa Tambah Uang Persediaan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	28.318.135,00
32	64.00/07.0/000032/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Setor Sisa Tambah Uang Persediaan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	1.991.717,00
33	64.00/07.0/000033/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Setor Sisa Tambah Uang Persediaan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	157.403.947,00
34	64.00/07.0/000034/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Setor Sisa Tambah Uang Persediaan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	64.640.000,00
35	64.00/07.0/000035/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Setor Sisa Tambah Uang Persediaan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	4.207.609,00
36	64.00/07.0/000036/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Setor Sisa Tambah Uang Persediaan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	18.146.000,00
37	64.00/07.0/000037/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Setor Sisa Tambah Uang Persediaan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	39.834.600,00
38	64.00/07.0/000038/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Setor Sisa Tambah Uang Persediaan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	198.066.162,00
39	64.00/07.0/000039/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Setor Sisa Tambah Uang Persediaan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan	9.453.194,00

		Timur	
40	64.00/07.0/000040/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Setor Sisa Tambah Uang Persediaan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	8.500.600,00
41	64.00/07.0/000041/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Setor Sisa Tambah Uang Persediaan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	8.381.178,00
42	64.00/07.0/000043/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Setor Sisa Tambah Uang Persediaan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	159.102.600,00
43	64.00/07.0/000044/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Setor Sisa Tambah Uang Persediaan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	46.893.764,00
44	64.00/07.0/000046/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Setor Sisa Tambah Uang Persediaan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	19.769.920,00
45	64.00/07.0/000047/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Setor Sisa Tambah Uang Persediaan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	825.323.223,00
46	64.00/07.0/000048/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Setor Sisa Tambah Uang Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	902.682.985,00
47	64.00/07.0/000049/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Setor Sisa Tambah Uang Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	1.327.445.593,00
48	64.00/07.0/000050/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Setor Sisa Tambah Uang Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	1.344.320.477,00
49	64.00/07.0/000051/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Setor Sisa Tambah Uang Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	1.186.768.992,00
50	64.00/07.0/000052/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Setor Sisa Tambah Uang Sekretariat	310.218.851,00

		DPRD Provinsi Kalimantan Timur	
51	64.00/07.0/000053/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Setor Sisa Tambah Uang Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	45.456.556,00
52	64.00/07.0/000054/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Setor Sisa Tambah Uang Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	1.752.998.641,00
53	64.00/07.0/000055/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Setor Sisa Tambah Uang Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	1.244.030.922,00
54	64.00/07.0/000056/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Setor Sisa Tambah Uang Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	1.155.248,00
55	64.00/07.0/000057/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Setor Sisa Tambah Uang Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	34.705.900,00
56	64.00/07.0/000058/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Setor Sisa Tambah Uang Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	91.708.266,00
57	64.00/07.0/000059/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Setor Sisa Tambah Uang Pada Sekretariat DPRD Prov. Kaltim	126.346.933,00
58	64.00/07.0/000060/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Setor Sisa Tambah Uang Pada Sekretariat DPRD Prov. Kaltim	50.556.851,00
59	64.00/07.0/000061/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Setor Sisa Tambah Uang Pada Sekretariat DPRD Prov. Kaltim	2.600.000,00
60	64.00/07.0/000062/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Setor Sisa Tambah Uang Pada Sekretariat DPRD Prov. Kaltim	25.071.387,00
61	64.00/07.0/000063/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Setor Sisa Tambah Uang Pada Sekretariat DPRD Prov. Kaltim	198.182.021,00
62	64.00/07.0/000064/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Setor Sisa Tambah Uang Pada Sekretariat DPRD Prov. Kaltim	238.026.228,00

63	64.00/07.0/000065/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Setor Sisa Tambah Uang Pada Sekretariat DPRD Prov. Kaltim	556.858.015,00
64	64.00/07.0/000066/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Setor Sisa Tambah Uang Pada Sekretariat DPRD Prov. Kaltim	265.576.377,00
65	64.00/07.0/000067/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Setor Sisa Tambah Uang Pada Sekretariat DPRD Prov. Kaltim	317.847.891,00
66	64.00/07.0/000068/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Setor Sisa Tambah Uang Pada Sekretariat DPRD Prov. Kaltim	6.010.102,00
67	64.00/07.0/000069/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Setor Sisa Tambah Uang Pada Sekretariat DPRD Prov. Kaltim	557.280.264,00
68	64.00/07.0/000070/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Setor Sisa Tambah Uang Pada Sekretariat DPRD Prov. Kaltim	371.586.342,00
69	64.00/07.0/000071/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Setor Sisa Tambah Uang Pada Sekretariat DPRD Prov. Kaltim	640.150.116,00
70	64.00/07.0/000072/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Setor Sisa Tambah Uang Pada Sekretariat DPRD Prov. Kaltim	252.538.987,00
71	64.00/07.0/000073/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Setor Sisa Tambah Uang Pada Sekretariat DPRD Prov. Kaltim	589.958.412,00
72	64.00/07.0/000074/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Setor Sisa Tambah Uang Pada Sekretariat DPRD Prov. Kaltim	618.875.476,00
73	64.00/07.0/000075/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/12/2024	Setor Sisa Tambah Uang Pada Sekretariat DPRD Prov. Kaltim	142.918.224,00
74	64.00/07.0/000076/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/1/2024	Setoran Sisa Tambah Uang Sekretariat Dprd Prov. Kaltim	139.981.738,00
75	64.00/07.0/000077/TU/4.02.0.0 0.0.00.04.0000/PPR1/1/2024	Setor Sisa Tambah Uang Perediaan Sekretariat DPRD	35.593.309,00

		Provinsi Kalimantan Timur	
--	--	---------------------------	--

4. Surat Tanda Sitoran pengembalian belanja dikarenakan sisa pengembalian uang persediaan tahun 2024 sebagai berikut :

Nomor	Nomor STS	Keterangan	Nilai (Rp)
1	64.00/06.0/000001/JP-NIH/4.02.0.00.0.00.04.0000/P PR1/12/2024	Setor Spa Uang Persediaan Sekretariat DPRD Prov.Kaltim	1.844.228.835,00

Berikutnya adalah rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis belanja disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III
Realisasi Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Prov. Kaltim Tahun 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024		(%)	31 Desember 2023	% NAIK (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=(3-5/2)
Belanja	383.161.994.639,00	257.815.834.763,00	67,30%	345.402.184.281,00	%
Belanja Operasi	357.073.455.471,00	332.102.173.712,00	93,01%	338.347.022.906,00	%
Belanja Pegawai	67.768.289.197,00	65.919.618.197,00	97,27%	64.014.402.566,00	%
Belanja Barang dan Jasa	289.305.246.276,00	266.183.155.515,00	92,01%	266.332.615.940,00	%
Belanja Modal	26.088.519.229,00	24.912.941.854,00	95,49%	35.055.881.775,00	%

Belanja secara total dapat dikatakan mencapai mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel diatas diketahui terdapat sebagian belanja yang mencapai target dan sebagian lagi tidak mencapai target. Adapun penjelasan dari masing-masing obyek belanja dapat dijelaskan sebagai berikut

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi memiliki persentase komponen jenis belanja. Dari target sebesar Rp357.073.455.471,00 teralisasi sebesar Rp332.102.173.712,00 atau 93,01%. Rincian obyek belanja operasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel IV

Realisasi Belanja Operasi Sekretariat DPRD Prov. Kaltim Tahun 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024		(%)	31 Desember 2023	% Real (Tahun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=(3-5)/2
Belanja Operasi	357.073.455.411,00	332.182.173.712,00	93,01%	330.547.012.506,00	%
Belanja Pegawai	67.768.209.197,00	65.919.018.197,00	97,27%	64.014.402.566,00	%
Belanja Honorarium dan Jasa	289.305.246.214,00	266.183.155.515,00	92,01%	266.532.619.940,00	%

• Belanja Pegawai

Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggabungkan sebesar Rp67.768.209.197,00 untuk memberikan Kompensasi kepada pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai Pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Anggota DPRD, Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS dan/atau non-PNS sebagai imbalan Atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi Pemerintah. Anggaran belanja pegawai Sekretariat DPRD tersebut terealisasi sebesar Rp65.919.018.197,00 atau sebesar 97,27%

Tabel V

Realisasi Belanja Pegawai Sekretariat DPRD Prov. Kaltim Tahun 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024		(%)	31 Desember 2023	% Real (Tahun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=(3-5)/2
Belanja Pegawai	67.768.209.197,00	65.919.018.197,00	97,27%	64.014.402.566,00	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.233.451.370,00	5.000.881.287,00	95,52%	4.728.001.408,00	%
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	10.417.545.861,00	9.008.737.500,00	84,09%	7.167.908.000,00	%
Honorarium PNS	498.270.000,00	498.000.000,00	93,52%	498.000.000,00	%

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	51.161.921.764,00	50.136.899.410,00	98,11%	51.193.212.100,00	%
Dana Operasional Pimpinan DPRD	514.800.000,00	514.800.000,00	100%	501.800.000,00	%

Terselanya anggaran belanja pegawai pada Sekretariat DPRD Prov. Kaltim sebesar Rp1.849.191.000,00 disetujui oleh :

1. Pada Tahun 2024 ada sebanyak 4 Orang PNS yang Pensiun Atas nama:
 - Moh. Iharnur, NIP. 19660228 198902 1 002, Pemula Muda Tingkat I (III/b), Nomor Surat : 001/SKPP/SET-DPRD.KALTIM/01/2024.
 - Sunaryo, NIP. 19660327 200901 1 001, Pengatur Tingkat I (II/d), Nomor Surat : 002/SKPP/SET-DPRD.KALTIM/04/2024.
 - Nina Afrida Mahery, SH, NIP. 19660424 198810 2 001, Penata Tingkat I (III/d), Nomor Surat : 003/SKPP/SET-DPRD.KALTIM/04/2024.
 - Drs. Yudi Gutot Schadi, NIP. 19661107 198609 1 001, Penata Tingkat I (III/d), Nomor Surat : 007/SKPP/SET-DPRD.KALTIM/11/2024.
2. Pada Tahun 2024 ada sebanyak 2 Orang PNS yang Meninggal Dunia Atas nama:
 - Hamdani, NIP. 19710906 201001 1 003, Pengatur Tingkat I (II/d), Nomor Surat : 003/SKPP/SET-DPRD.KALTIM/04/2024.
 - Mimin Amuyati, S.Sos, NIP. 19630813 198902 2 003, Penata Tingkat I (III/d), Nomor Surat : 006/SKPP/SET-DPRD.KALTIM/07/2024.

Pada tahun 2024 dari beberapa Keputusan belanja yang tidak digunakan yaitu belanja tunggangan PPh/Tunggangan Khusus PNS dikarenakan Tunggangan Pajak Penghasilan DPRD dianggarkan pada Tahun 2024 sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun, adanya Sosialisasi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur terkait aturan pajak yang berlaku bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seluruh Indonesia antara lain:

- A. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 11 berbunyi :
- Pejabat Negara terdiri Atas :
1. Presiden dan Wakil Presiden;

2. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota MPR;
 3. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR;
 4. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada MA;
 5. Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
 6. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
 7. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK;
 8. Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri;
 9. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
 10. Gubernur dan Wakil Gubernur;
 11. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota; dan
 12. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang MPR, DPRD, DPD dan DPRD Pasal 400 berbunyi Anggota DPRD Provinsi dilarang menringkap jabatan sebagai :
1. pejabat nagaratau pejabat daerah lainnya
 2. hakim pada badan peradilan pegawai negeri sipil, anggota Ternara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara
 3. Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan Dan Penghasilan Pajak Penghasilan Pasal 21Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negaraatau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- d. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 252 tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Dalarn hal PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya diangkat sebagai pimpinan dan/atau anggota pada lembaga yang tidak termasuk sebagai Pejabat Negara, Atas penghasilan yang menjadi beban APBNatau APBD terkait dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan/atau anggota pada lembaga tersebut dikenali pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan tidak ditanggung oleh Pemerintah.
- Dengan dasar hukum diatas maka Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi termasuk dalam klasifikasi bukan pejabat negara yang pajak tidak ditanggung pemerintah dengan kata lain pajak Atas penghasilan anggota DPRD Provinsi merupakan tanggungjawab pribadi anggota DPRD Provinsi.

- **Belanja Barang dan Jasa**

Pada tahun 2024 Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggunakan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah (Penda) dan belanja perjalanan sebesar Rp289.305.246.274,00 atau sebesar 92,01%.

Tabel VI

Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa Sekretariat DPRD Prov. Kaltim Tahun 2024 dan 2023

Urut:	31 Desember 2024		(%)	31 Desember 2023	
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	% Naskh (Terus)
1	2	3	4=(3/2)	5	6=(5/2*100)
Belanja Barang dan Jasa	289.305.246.274,00	266.182.195.315,00	92,01%	266.182.195.315,00	%
Belanja Barang	98.714.213.470,00	87.832.349.847,00	88,67%	87.548.201.892,00	%
Belanja Jasa	110.382.578.590,00	106.682.488.340,00	96,66%	113.515.399.374,00	%
Belanja Pemeliharaan	7.889.622.400,00	7.003.560.650,00	88,77%	10.382.144.772,00	%
Belanja Perjalanan Dinas	111.798.831.800,00	93.844.056.078,00	83,94%	74.863.274.402,00	%

Terminanya anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp23.122.090.759,00 disebabkan oleh:

1. Pada beberapa program kegiatan belanja barang dan jasa sudah terealisasi untuk fisik maupun keuangan serta hampir mencapai target dan terminanya beberapa diprogram kegiatan merupakan efisiensi anggaran.

5.1.2.2 Belanja Modal

Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan sebesar Rp26.088.539.228,00 untuk menambah aset tetap. Anggaran belanja modal tersebut terrealisasi sebesar Rp24.912.861.051,00 atau sebesar 95,49%.

Tabel VII
Realisasi Anggaran Belanja Modal Sekretariat DPRD Prov. Kaltim Tahun
2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024		(%)	31 Desember 2023	% Sal. (Tertut)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=(3-5/2)
Belanja Modal	26.088.539.228,00	24.912.861.051,00	95,49%	23.053.000.779,00	%
Belanja Modal Tumbuh					
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.155.657.808,00	22.362.989.553,00	99%	23.839.969.280,00	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.442.791.720,00	2.409.877.500,00	99,39%	2.857.511.275,00	%
Belanja Modal Jalan, jembatan dan Jalanraya	125.520.700,00	0,00	0%	1.248.756.800,00	%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	4.990.000,00	99,84%	110.204.420,00	%
Belanja Modal Aset Lainnya	139.580.000,00	139.000.000,00	99,64%	0,00	%

Realisasi Belanja modal sebesar Rp24.912.861.051,00 dipergunakan untuk menambah aset berupa:

1) Aset Peralatan dan Mesin	Rp 23.155.657.808,00
• Belanja Modal Alat Angkutan	Rp 10.084.857.891,00
• Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp 0,00
• Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 6.325.594.160,00
• Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi	Rp 2.711.036.500,00
• Belanja Modal Alat Kedokteran Kesehatan	Rp 0,00

• Belanja Modal Alat laboratorium	Rp	0,00
• Belanja Modal Komputer	Rp	3.241.500.000,00
2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	2.405.877.500,00
Belanja Modal Bangunan Gedung	Rp	2.405.877.500,00
Belanja Modal Taman	Rp	0,00
3) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	0,00
Belanja Modal Jalan Provinsi	Rp	0,00
4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	4.995.000,00
Belanja Modal Perpustakaan	Rp	4.995.000,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	Rp	0,00
5) Belanja Modal Aset Lainnya	Rp	139.000.000,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	Rp	139.000.000,00
TOTAL	Rp	24.912.861.051,00

Masih termanya anggaran belanja modal sebesar Rp1.175.678.177,00 dihabiskan oleh:

1. Pada Belanja Modal Aset sudah terealisasi untuk fisik maupun keuangan serta mencapai target dan tersisa anggaran tersebut adalah merupakan efisiensi anggaran.
2. Pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak terealisasi dikarenakan pihak PLN tidak dapat memenuhi daya trafo yang tersedia di kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur karena masih menunggu daya untuk beroperasi.

5.1.3 Bahan LO

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada tahun 2024 sebesar Rp331.908.548.974,87. Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar Rp342.444.424.907,43 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp10.535.875.932,56 atau 3,08%. Rincian pendapatan Bahan LO tahun 2024 komparasi dengan tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

TABEL VIII
Realisasi Beban LO Tahun 2024 dan 2023

Uraian	2024	2023	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
Beban	331.908.248.874,87	342.444.424.907,43	3,08
Beban Operasi	331.878.224.751,54	330.402.686.206,43	0,45
- Beban Pegawai	63.918.112.187,06	64.014.403.566,00	2,98
- Beban Barang dan Jasa	267.960.204.554,54	266.388.282.640,43	0,16
Beban Penyusutan dan Amortisasi	30.024.224,33	12.041.738.701,00	(79,75)
- Beban Penyusutan Peralatan Dan Mesin	0,00	(6.380.310.383,00)	(100)
- Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan	0,00	2.912.379.148,00	(100)
- Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	2.722.471.470,00	(100)
- Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	30.024.224,33	16.431.700,00	84,55

5.1.3.1 Beban Operasi

Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 menanggung beban operasi sebesar Rp331.878.224.751,54. Bila dibandingkan dengan periode tahun lalu yaitu sebesar Rp330.402.686.206,43 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp1.475.538.545,11 atau 3,08%. Rincian Beban Operasi tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.3.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menimbulkan denda disebabkan pemberian kompensasi kepada pegawai Atas tugas yang diberikan kepadanya. Bila Beban Pegawai tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 maka terjadi kenaikan sebesar Rp1.904.611.631,00 atau sebesar 2,98%.

5.1.3.3 Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menimbulkan denda sebagai kompensasi Atas layanan yang diberikan oleh pihak lain. Bila beban jasa tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 maka terjadi penurunan sebesar Rp429.077.085,89 atau sebesar 0,16%, hal ini disebabkan antara lain:

- A. Belanja Pemeliharaan barang, ruang kerja, kendaraan dan rumah dinas jabatan pimpinan dan Gedung Kantor ada penurunan disebabkan karena adanya kegiatan rehab gedung kantor yang dilaksanakan dari dinas Pekerjaan Umum
- B. Dengan adanya surat Pemerintah terkait surat yang melukukan perjalanan luar daerah maka hal tersebut merupakan pedoman bagi Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas kedesunan baik rapat luar daerah dan kunjungan kerja dalam daerah. Dengan adanya kegiatan rapat-rapat dan kunjungan kerja dapat berjalan lancar maka hal ini yang menyebabkan realisasi perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat DPRD Prov Kaltim.

5.1.3.4 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi adalah penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan akuitas sebagai akibat penggunaan aset tetap berwujud (penyusutan) dan aset tidak berwujud (amortisasi). Bila Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 maka terjadi kenaikan sebesar Rp12.011.414.477,67 atau sebesar 99,75%, hal ini disebabkan antara lain:

- A. Pada tahun 2024 Tidak ada Beban Penyusutan pada Peralatan dan Mesin
- B. Pada Tahun 2024 Tidak ada Beban Penyusutan pada Gedung dan Bangunan
- C. Pada Tahun 2024 Beban Amortisasi Aset lainnya – Aset Tidak berwujud terdapat perhitungan total beban amortisasi sebesar Rp30.324.223,35 ini adalah Aset Tidak Berwujud berupa 4 jenis Aplikasi diantara lainnya adalah Software aplikasi Type 018 Tanggal perolehan 09 Desember 2022, Software Aplikasi Kategori 4 tanggal perolehan 16 maret 2023, Software Aplikasi Perjalanan dinas Tanggal perolehan 05 Agustus 2023, dan Software Aplikasi Surat Menyurat tanggal perolehan 18 Desember 2023 dan Software aplikasi SIVER tanggal perolehan 08 November 2024.
- Tidak ada Beban Penyusutan Piutang

5.1.4 Aset

Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset sebesar Rp175.141.640.545,43 pada tahun 2024. Bila dibandingkan dengan aset tahun lalu yaitu sebesar Rp150.254.250.806,30 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp24.887.389.739,13 atau 17%. Rincian pendapatan aset tahun 2024 beserta komparasi dengan tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

TABEL IX
Perbandingan Aset Tahun 2024 dan 2023

Aset	2024	2023	% (2024/2023)
1	2	3	4=(2-3)/3
Aset	175.141.640.545,43	150.254.250.806,30	17
Aset Lancar	240.701.723,34	31.658.812,50	84
- Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	-
- Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	-
- Bahan Dibayar Dimuka	34.985.573,36	31.658.812,50	(11)
- Persediaan	105.716.150,00	0,00	000
- Piutang Pajak	0,00	0,00	-
- Piutang Bukan Pajak	0,00	0,00	-
- Piutang Retribusi	0,00	0,00	-
- Piutang Lainnya	0,00	0,00	-
- Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0,00	0,00	-
Aset Tetap	173.189.172.794,80	148.527.431.743,80	8,17
- Tanah	21.353.737.500,00	21.393.377.980,00	-
- Peralatan dan Mesin	115.330.230.672,60	133.318.391.121,00	17,00
- Gedung dan Bangunan	148.899.379.887,30	146.407.442.387,00	2,00
- Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.874.688.720,58	6.874.688.730,00	0,00
- Konstruksi Dalam Pengerjaan	738.503.334,00	258.401.134,00	0,00
- Akumulasi Penyusutan	(148.628.801.319,00)	(148.628.801.320,00)	0,00
Aset Lainnya	1.771.706.026,47	1.685.148.250,80	5,00
- Aset Tidak Berwujud	3.044.164.970,00	2.905.144.970,00	5,50
- Aset Lain-lain	1.331.490.000,00	1.373.570.000,00	(1,00)

Item	2024	2023	% Nak (Daim)
1	2	3	4=(2-3)
- Akumulasi Aset Tidak Berwujud	(2.423.878.940,33)	(2.753.514.700,00)	1,0
Kewajiban	231.950.477,00	206.856.936,00	(24,00)
Kewajiban Jangka Pendek	231.950.477,00	206.856.936,00	(24,00)
- Utang Belanja	231.950.477,00	206.856.936,00	(24,00)
Ekuitas	(174.809.800.000,42)	(149.267.204.280,38)	17,0
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	357.015.034.763,00	305.407.104.281,00	(14,00)

5.1.4.1 Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pada tahun 2024 Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset lancar sebesar Rp200,701,723,96. Bila dibandingkan dengan aset lancar tahun lalu yaitu sebesar Rp31,653,812,50 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp169,047,911,46 atau 84%. Perubahan nilai aset lancar tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

5.1.4.1.1 Kas di Bendahara Penerimaan

Sekretariat DPRD Prov. Kaltim tidak ada Bendahara Penerimaan.

5.1.4.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Sekretariat DPRD pada tahun 2024 Memiliki 4 (empat) rekening bank yaitu :

1. Bendahara Pengeluaran : 0011401192
2. Bendahara Pengeluaran Pembantu PP : 0011453023
3. Bendahara Pengeluaran Umum : 0011453015
4. Bendahara Pengeluaran FPP : 0011453007

Bendahara pengeluaran telah menyetorkan seluruh sisa uang persediaan pada akhir tahun 2024, sehingga tidak terdapat sisa uang Kas di Bendahara Pengeluaran. Sesuai amanah Surat Edaran Gubernur Nomor 900.1/18742/BPKAD tanggal 13 Desember 2024 tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Berkenaan Dengan Akhir Tahun Anggaran 2024 Dan Awal Tahun Anggaran 2025 Serta Penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, bendahara keuangan harus sudah menyetorkan sisa uangnya sebelum tanggal 31 Desember 2023. Tidak adanya nilai kas di Bendahara Pengeluaran tahun ini sama dengan sebagaimana tahun 2023 yang lalu.

Uang Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (nihil), Surat Tanda Setoran pengembalian sisa Uang Persediaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Atas Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Nomor	Tanggal	Nilai
1	0082/STSS/SET.DPRD/2024	30/12/2023	1.844.228.835

5.1.4.1.3 Persediaan

Barang atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual diserahkan dalam rangka pelayanan ke masyarakat Per 31 Desember 2024 sebesar Rp185.716.150,00 bila dibandingkan dengan persediaan tahun lalu yaitu sebesar Rp0,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp185.716.150 atau 100 %. Hal ini dikarenakan besarnya permintaan barang untuk kegiatan Anggaran DPRD Prov. Kaltim dan kebutuhan operasional dari kantor Sekretariat DPRD Prov. Kaltim

5.1.4.1.4 Beban dibayar dimuka

Pada tahun 2024 Sekretariat DPRD terdapat belanja dibayar dimuka ini adalah merupakan belanja Asuransi Belanja Barang Milik Daerah merupakan belanja untuk melindungi atau memproteksi aset barang milik daerah dengan perhitungan masa manfaat 13 bulan sebesar Rp14.985.573,96 apabila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp31.658.812,50 dibandingkan dengan tahun lalu ada penurunan sebesar Rp16.673.238,54 atau 53%

5.1.4.2.1 Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset nonlancar yang tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat pihak lain dan dipergunakan sendiri dalam rangka mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah. Pada tahun 2024 Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset tetap sebesar Rp173.169.172.794,80 bila dibandingkan dengan aset tetap tahun lalu yaitu sebesar Rp148.537.451.743,80 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp24.631.721.051,00 atau 17%. Perubahan nilai aset tetap tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang diuraikan dibawah ini.

TABEL X
Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset tetap 2024

Uraian	2024	Bersedia	Berkurang	2024	% Nilai 17% TMR
1	2	3	4	5=(2-3-4)	6=(5-25)
Aset Tetap					
a. Tanah	21.353.737.500,00	-	-	21.353.737.500,00	-
b. Peralatan dan Mesin	155.526.339.671,00	21.220.048.551,00	-	134.306.291.120,00	18
- Alat Besar	546.150.000,00	-	-	546.150.000,00	0
- Alat Angkutan	13.711.400.340,00	10.073.307.051,00	-	3.638.093.289,00	73,9
- Alat Bengkel dan Ukur	22.714.000,00	-	-	22.714.000,00	100
- Alat Kantor & Rumah T	123.600.021.775,00	6.165.554.500	-	117.434.467.275,00	9,0
- Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar	11.431.310.235,00	2.308.648.300,00	-	9.122.661.935,00	20
- Komputer	5.465.813.750,00	621.970.000,00	-	4.843.843.750,00	30
c. Gedung dan Bangunan	146.369.319.887,00	2.405.077.500	-	143.964.242.387,00	2
- Bangunan Gedung	146.369.319.887,00	2.405.077.500	-	143.964.242.387,00	2
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.874.606.730,00	-	-	6.874.606.730,00	0
- Jalan dan Jembatan	6.874.606.730,00	-	-	6.874.606.730,00	0
e. Aset Tetap Lainnya	401.204.000,00	-	-	397.299.000,00	
- Bahan Perpustakaan	10.000.000,00	-	-	9.000.000,00	40
- Aset Tetap dalam Renovasi	391.204.000,00	-	-	391.204.000,00	0
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	750.613.334,00	-	-	750.613.334,00	0
- Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	750.613.334,00	-	-	750.613.334,00	0
- Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan Dan Irigasi	0,00	-	-	00	0
g. Akumulasi Penyusutan	140.628.801.329,00	-	-	140.628.801.329,00	-
h. Aset Lainnya	1.771.746.824,67	80.625.756,67	-	1.691.121.068,00	5
- Aset Tidak Berwujud	1.144.364.970,00	120.000.000,00	-	1.024.364.970,00	5
- Aset Lain-Lain	1.221.480.000,00	-	22.000.000,00	1.199.480.000,00	(1)
- Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.823.878.943,37)	-	22.000.000,00	(2.791.878.943,37)	1

Unsur	2021	Bertambah	Berkurang	2022	4-5 a (b) (c) (d)
1	2	3	4	5=(2+3-4)	6-7 -15
I. Kewajiban	231.550.477,00	-	(54.356.040,00)	236.856.526,00	(20)
- Utang Belanja	231.550.477,00	-	(54.356.040,00)	236.856.526,00	(21)
J. Ekuitas	174.508.098.988,45	24.942.255.785,13	-	149.567.594.203,3	17

5.1.4.2.1.1 Tanah

Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur memiliki tanah sebesar Rp21.353.737.500,00. Bila dibandingkan dengan aset tetap tahun lalu yaitu sebesar Rp21.353.737.500,00 maka dapat diketahui tidak terdapat kenaikan/ penurunan.

Belanja Modal : Rp0,00

- Hibah : Rp0,00
- Reklasifikasi dari : Rp0,00
- Revaluasi : Rp0,00

Pengurangan

- Rusak Berat : Rp0,00
- Dihapuskan : Rp0,00
- Reklasifikasi dari : Rp0,00

5.1.4.2.1.2 Peralatan dan Mesin

Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur memiliki peralatan dan mesin sebesar Rp155.539.239.672,00. Bila dibandingkan dengan peralatan dan mesin tahun lalu yaitu sebesar Rp133.318.391.121,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp22.220.848.551,00 atau 17%. Perubahan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Pertambahan

- Belanja Modal : Rp 22.220.848.551,00
- Hibah : Rp0,00
- Reklasifikasi dari Aset : Rp0,00
- Tetap Lainnya : Rp0,00
- Revaluasi : Rp0,00

Pengurangan

- Rusak Berat : Rp0,00
- Dihapuskan : Rp10.950.000,00
- Reklasifikasi ke : Rp0,00
- Nilai dibawah Kapitalisasi : Rp120.000.000,00
- Ekstrakompabel : Rp11.190.000,00

Rincian nilai dari penambahan aset adalah sebagai berikut :

- ❖ Aset yang dihapuskan senilai Rp10.950.000,00 adalah merupakan aset kendaraan bermotor roda 2 berdasarkan LHP BPE dengan nomor surat Kepolisian penghapusan Nomor: 000.2.4/3764/BPKAD-VI Tanggal 13 Februari 2024.
- ❖ Belanja modal yang tidak menjadi aset tetap/ Nilai dibawah kapitalisasi senilai Rp120.000.000,00 adalah merupakan pekerjaan gorden rumah jabatan pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang Dimana perhitungan per meter Rp300.000,00.
- ❖ Elakomptabel yang senilai Rp11.190.000,00 adalah merupakan berupa barang
 1. Kursi kayu rumah jabatan senilai Rp10.000.000,00
 2. Stand speaker rumah jabatan senilai Rp1.190.000,00

Berdasarkan hasil rekonsiliasi aset tetap dengan belanja modal di SIPR-R1 dan SIPRMD.

5.1.4.2.1.3 Gedung dan Bangunan

Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur memiliki gedung dan bangunan sebesar Rp148.869.319.887,80 jika dibandingkan dengan gedung dan bangunan tahun lalu yaitu sebesar Rp146.463.442.387,80 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp2.405.877.500,00 Perubahan nilai gedung dan bangunan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut

Penambahan

- Belanja Modal	Rp1.405.877.500,00
- Hibah	Rp0,00
- Reklasifikasi dari KDP	Rp0,00
- Revaluasi	Rp0,00

Pengurangan

- Rusak Berat	Rp0,00
- Dihapuskan	Rp0,00
- Reklasifikasi	Rp0,00
- Nilai dibawah Kapitalisasi	Rp0,00

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk jutaan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset gedung dan bangunan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Nilai perolehan gedung dan bangunan yang bernilai Rp20.000.000 keatas.
- Nilai pemeliharaan gedung dan bangunan yang bernilai Rp50.000.000 keatas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat) atau menambah kuantitas atau kualitas layanan.

Atas gedung dan bangunan yang nilai perolehannya sebesar Rp20.000.000 dan kurang dari nilai tersebut maka dimasukkan dalam pembukuan tersendiri di luar neraca (ekstracountable). Per 31 Desember 2024 tidak terdapat nilai gedung dan bangunan yang tercatat dalam ekstracountable.

5.1.4.2.1.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pada Tahun 2024 Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur memiliki Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp6.874.669.730,00. Bila dibandingkan dengan Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun lalu yaitu sebesar Rp6.874.669.730,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp0.

Perubahan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dirinciikan sebagai berikut.

Penambahan

- Belanja Modal : Rp0,00
- Hibah : Rp0,00
- Reklasifikasi dari KDP : Rp0,00
- Revaluasi : Rp0,00

Pengurangan

- Rusak Berat : Rp0,00
- Dihapuskan : Rp0,00
- Reklasifikasi dari : Rp0,00
- Nilai dibawah Kapitalisasi : Rp0,00

5.1.4.2.1.5 Aset Tetap Lainnya

Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur memiliki Aset Tetap Lainnya sebesar Rp402.394.000,00. Bila dibandingkan dengan Aset Tetap Lainnya tahun lalu yaitu sebesar Rp397.399.000,00 maka dapat diketahui tidak terdapat penuruan. Sebesar Rp 4.995.000.00. Perubahan nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dirinciikan sebagai berikut.

Penambahan

- Belanja Modal : Rp4.995.000,00
- Hibah : Rp0,00
- Reklasifikasi dari : Rp0,00
- Revaluasi : Rp0,00

Pengurangan

- Rusak Berat : Rp0,00
- Dihapuskan : Rp22.050.000,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya : Rp0,00
- Nilai dibawah Kapitalisasi : Rp0,00

- ❖ Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah yang dihapuskan senilai Rp22.050.000,00 adalah merupakan aset kendaraan bermotor roda 2 sebanyak 2 unit kendaraan yang akan di jual/walrus Lelang berdasarkan dengan nomor surat Keputusan penghapusan Nomor 000.2/43764/BPKAD-VI Tanggal 13 Februari 2024.

5.1.4.2.1.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Pada Tahun 2024 Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur memiliki Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp758.613.334,00 Bila dibandingkan dengan Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun lalu yaitu sebesar Rp758.613.334,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp0. Perubahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Penambahan

- Belanja Modal : Rp0,00
- Hibah : Rp0,00
- Reklasifikasi dari _____ : Rp0,00
- Revaluasi : Rp0,00

Pengurangan

- Rusak Berat : Rp0,00
- Dihapuskan : Rp0,00
- Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan : Rp0,00
- Nilai dibawah Kapitalisasi : Rp0,00

5.1.4.2.1.7 Aset Lainnya

Pada Tahun 2024 Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur memiliki Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.771.766.026,67 Bila dibandingkan dengan Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun lalu yaitu sebesar Rp1.685.140.250,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp86.625.776,67. Perubahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Penambahan

- Belanja Modal : Rp0,00
- Aset Tidak Berwujud : Rp30.324.223,33
- Hibah : Rp0,00
- Reklasifikasi dari _____ : Rp0,00
- Revaluasi : Rp0,00

Pengurangan

- Rusak Berat : Rp0,00
- Dihapuskan : Rp0,00
- Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan : Rp0,00
- Nilai dibawah Kapitalisasi : Rp0,00

Penambahan nilai beban amortisasi tidak berwujud software sebesar Rp30.324.223,33 terletak pada pengadaan aplikasi software SIVEB yang berfungsi sebagai pengumpulan surat pertanggungjawaban verifikasi online.

5.1.4.2.1.8-Kewajiban

Pada Tahun 2024 Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur memiliki Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp231.950.477,00. Bila dibandingkan dengan Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun lalu yaitu sebesar Rp236.856.526,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp5.906.049,00. Perubahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut.

Penambahan

- Belanja Modal : Rp0,00
- Aset Tidak Berwujud : Rp0,00
- Hibah : Rp0,00
- Reklasifikasi dari : Rp0,00
- Revaluasi : Rp0,00

Pengurangan

- Rusak Berat : Rp0,00
- Dihapuskan : Rp0,00
- Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan : Rp0,00
- Nilai dibawah Kapitalisasi : Rp0,00

❖ Penambahan nilai kewajiban terletak pada belanja jasa tagihan Listrik, air, telepon dan internet lainnya.

TABEL XI

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024 dan 2023

Uraian	2024	2023	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3)/3
Akumulasi Penyusutan	(108.628.881.329,00)	(108.628.881.329,00)	0,00
- Peralatan dan Mesin	(92.698.302.139,00)	(92.698.302.139,00)	0,00
- Gedung dan Bangunan	(81.799.673.816,00)	(81.799.673.816,00)	0,00
- Jalan, Jembatan dan Irigasi	(4.130.925.374,00)	(4.130.925.374,00)	0,00

5.1.4.2.2 Aset Lainnya

Aset Pada Tahun 2024 Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur memiliki Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.771.766.026,67. Bila dibandingkan dengan Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun lalu yaitu sebesar Rp1.685.140.250,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp86.625.776,67 atau 5%.

5.1.4.2.2.1 Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas yang dibatasi penggunaannya adalah kas yang hanya dapat digunakan untuk suatu tujuan tertentu atau dapat berubah menjadi kas (aset lancar) bila persyaratannya telah terpenuhi. Kas yang dibatasi penggunaannya tidak terdapat pada Dinas Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

5.1.4.2.2.2 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tidak Berwujud di tahun 2024 memiliki aset tidak berwujud sebesar Rp3.044.164.970,00 bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp2.905.164.970,00 terdapat kenaikan sebesar Rp139.000.000,00 pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur ini adalah merupakan belanja Software Aplikasi antara lain:

- ❖ Software Aplikasi Kategori 4 dengan perolehan nilai sebesar Rp139.000.000,00 berdasarkan nomor kontrak : 381/KONTRAK-UM/TM/2024 dan No SP2D : 64.00/04.0/000870/LS-4.02.0.00.04.000/P.01/12/2024.

5.1.4.2.2.3 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain merupakan aset yang tidak dapat dikategorikan kedalam aset lancar ataupun aset tetap atau aset lainnya. Aset yang termasuk dalam kategori ini meliputi dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Aset Rusak Berat

Pada tahun 2024 Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset tetap yang kondisinya rusak berat sebesar Rp21.900.000,00 berdasarkan perhitungan koreksi kertas kerja aset Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) dari aset lainnya (BMD) dari aset tetap ke aset lainnya yang (Peralatan dan Mesin).

5.1.4.2.2.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Pada Tahun 2022 Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur memiliki Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp2.823.878.943,33 bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp2.793.554.720,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp30.324.223,33 atau 1%.

5.1.5 Kewajiban

Pada Tahun 2024 Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur memiliki Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp231.950.477,00 Bila dibandingkan dengan Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun lalu yaitu sebesar Rp386.856.526,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp54.906.049,00

5.1.5.1 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang telah diterima pembayarannya namun jasa atau barang belum diberikan ke Masyarakat atau pihak lain. Pada akhir tahun 2024 tidak terdapat Pendapatan Diterima Dimuka

5.1.5.2 Utang Belanja Jasa

Utang beban merupakan utang yang timbul akibat telah diterimanya layanan atau jasa namun belum dibayar atau dilunasi tagihannya. Pada akhir tahun 2024 tidak terdapat Utang Belanja Jasa

5.1.6 Ekuitas

Kelayaan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2024 sebesar Rp174.909.690.068,43 Nilai ini secara matematis merupakan selisih lebih dari aset atas kewajiban. Pada akhir tahun 2024 terdapat ekuitas sebesar Rp174.909.690.068,43 Bila dibandingkan dengan ekuitas tahun lalu yaitu sebesar

Rp149.967.294.280,30 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp24.942.295.388,13 atau 17%. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya Belanja Modal atau penambahan Aset Tetap.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Demrell dan Struktur Organisasi

Secretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur beralamat di Jl Teuku Umar No 01 Kecamatan Sei. Kumpang Kelurahan Lok Bahu kota Samarinda Dalam melaksanakan tugas pelayanan, Secretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki sejumlah UPDAB sebagai unit teknis yang langsung berhadapan dengan masyarakat saat pelayanan.

Demi menunjang efektivitas pelayanan yang diberikan instansi dalam hal kejelasan tanggung jawab, kedudukan antar personil, jalur hubungan, uraian tugas dan tanggung jawab maka dibentuklah struktur organisasi sebagaimana yang telah disebutkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Sumbuhan Organisasi, Tugas, fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut maka dapat disajikan bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut.



Masing-masing pihak yang terdapat dalam struktur organisasi diatas memiliki peran dan tanggungjawab yang berbeda-beda dalam kegiatan operasional layanan. Penjabaran tugas dan fungsi pihak-pihak tersebut akan dijelaskan lebih rinci pada subbab jenis dan fungsi.

6.2. Tugas dan Fungsi

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda, hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*.

Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD, Antara lain,

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Sekretaris DPRD menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. Perencanaan, pengoordinasian pembinaan, pengarsihan dan pengendalian kebijakan teknis urusan umum dan keuangan, persidangan dan perundang-undangan, dan fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan umum dan keuangan;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang persidangan dan
- e. Perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
- g. Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan umum dan keuangan, bidang persidangan dan perundang-undangan serta bidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
- i. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- j. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Sekretaris DPRD mempunyai urusan tugas:

- a. Menyelenggarakan kegiatan fasilitasi rapat serta menyediakan sarana dan prasarana rapat dinas kegiatan pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan rapat di lingkungan Sekretariat DPRD;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis bidang umum dan keuangan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, kebijakan teknis bidang perundangan dan perundang-undangan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis bidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku;
- d. Mengendalikan penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli dan tim ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD; dan
- e. Melaksanakan pendampingan terhadap pimpinan DPRD dalam melaksanakan kunjungan kerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisien dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipaparkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bagian harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

6.3. Sumber Daya Manusia

Dalam memenuhi tugas dan fungsi yang diberikan maka Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur diberikan berbagai sumber daya yang dapat dipergunakan untuk menjalankan layanan. Diantara sumber daya yang ada, sumber daya manusia adalah yang paling memiliki peranan penting. Bila dilihat dari latar belakang pendidikan serta jabatan, maka sumber daya manusia di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dapat digambarkan seperti pada tabel berikut:

Tabel XII

Jabatan dan Jenjang Pendidikan Personil Tahun 2024

Jabatan	Pendidikan							
	SD	S1	S2	S3	D.IV	D.III	SMA	SMP
Kepala Dinas			1					
Kepala Bagian			2	1				
Kepala Sub Bagian				1				
Staf PNS			6	13	1	2	35	3
Jumlah			9	15	4	2	35	3

Masing-masing personil senantiasa diuntut untuk memperbarui pengetahuan tekniknya baik dalam hal keterampilan pendukung, terlebih lagi pengetahuan terhadap peraturan-peraturan terbaru serta teknologi informasi.

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan utama untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pihak pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan.

Laporan ini disusun dengan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berterima umum dalam lingkungan sistem pengendalian intern yang terus diperbaiki untuk dipertama guna menjamin kredibilitas laporan keuangan yang dihasilkan. Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, mengingat upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan dimulai jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih terdapat hal yang harus kami perbaiki dalam penyusunan laporan keuangan periode berikutnya. Sebelum hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2024 disajikan resmi dengan kondisi objektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya.

Kami berharap pengungkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berbasis akrual ini dapat berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran kami harapkan dari perbaikan penyajian dan peningkatan kualitas pengelolaan serta akuntabilitas Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dan terus melimpahkan rahmat-Nya atas segala upaya yang telah kita lakukan dalam rangka mewujudkan terbit akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Januari 2025
DPRD Provinsi
Kalimantan Timur,

Ir. H. Nurhasan U.S. M.Si
Ketua Utama Muda (TV&C)
NIP. 19660531 198609 2 001